TUGAS FILSAFAT MORAL
PESTA DEMOKRASI DAN ISTILAH “SERANGAN FAJAR” DI INDONESIA

Dosen pengampu : Dr.Agustinus W.Dewantara,S,S.,M.Hum

DISUSUN OLEH :
RISKA AYU YULIANI (32318426)
PRODI D3 FARMASI REGULER SORE

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA MADIUN
TAHUN AJARAN 2018/2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan makalah saya yang berjudul “” dengan baik meskipun banyak kekurangan didalamnya. Dan saya juga berterima kasih kepada Dr. Agustinus W. Dewantara, S.S., M. Hum Unika Widya Mandala Madiun yang telah memberikan tugas ini serta pembelajaran ini kepada saya.

Adapun tujuan penyusunan makalah ini adalah untuk melihat sedikit tentang tradisi pesta demokrasi yang ada di Indonesia. Sejak dulu, Indonesia memang menganut pemerintahan demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, ketika musim pesta demokrasi, pastinya ada adat atau tradisi yang dilakukan sehingga menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat luas. Maka dari itu, dalam makalah ini saya singgung sedikit tentang adat pesta demokrasi yang ada di Indonesia.

Dan dalam pembuatan makalah ini penyusun menyadari mungkin banyak kesalahan dan kekeliruan maka dari itu penyusun mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan makalah ini di masa yang akan datang.

Madiun, Juni 2019

Penyusun

BAB I

Rumusan Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya, baik dari sumber daya alam nya, maupun sumber daya manusia. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat, dan kepercayaan. Dari keberagaman itulah, pemerintahan menganut sistem pemerintahan demokrasi, yaitu pemerintahan yang di buat dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

- Pemerintahan dari rakyat artinya pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas dari rakyat melalui mekanisme demokrasi, yaitu dalam pemilihan umum Presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota, dan Kepala Desa. Masyarakat memiliki hak untuk menyalurkan pilihan mereka melalui pemilihan umum.
- Pemerintahan oleh rakyat artinya negara di jalankan oleh rakyat melalui mandat sehingga rakyat menjadi pengawas yang di jalankan oleh wakil rakyat.
- Pemerintahan untuk rakyat artinya kekuasaan yang di berikan oleh rakyat kepada pemerintahan harus di jalankan untuk kepentingan dan di arahkan pada kesejahteraan rakyat.

Di tahun 2019 ini, pesta demokrasi kembali di laksanakan serentak di Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 April. Beberapa bulan sebelumnya, para kandidat, baik calon presiden atau calon wakil presiden, calon legislatif, maupun partai politik sibuk berkampanye. Dalam proses panjang ini, tak jarang kita temui kejadian berunsur negatif terjadi di kalangan masyarakat. Misal, penyebaran berita hoax antar golongan, provokasi, ujaran kebencian, bahkan fitnah. Melalui media sosial, itu semua di lakukan dengan mudah karena mayoritas masyarakat Indonesia sudah melek teknologi. Mereka mencari sasaran kaum muda seperti aktivis ataupun mahasiswa untuk ikut menjadi anggota dari salah satu kubu mereka. Kemudahan akses media sosial menyebabkan ujaran kebencian atau hoax secara cepat menyebar hingga ke pelosok tanah air. Ini menjadi ancaman serius bagi pemerintahan, karena dengan media sosial, mereka yang tidak tahu menahu tentang suatu kubu menjadi terprovokasi yang akhirnya ikut membenci dan terjadi perpecahan di antara masyarakat Indonesia. 17 April 2019 menjadi hari dimana kita harus bertanggung jawab akan pilihan kita. Sesuai dengan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia, yaitu pemerintahan dari

rakyat. Maka dari itu, rakyat memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani mereka, bukan dari iming-iming suatu partai.

BAB II

Landasan Teori

A. Pengertian Politik

Pengertian Politik adalah suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat dimana wujudnya adalah proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Definisi politik juga dapat diartikan sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan, baik secara konstitusional maupun non-konstitusional.

(<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-politik.html>)

B. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin.

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti jika dikatakan, pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Manuel Kaisiepo menyatakan tentang pemilu:

Memang telah menjadi tradisi penting hampir-hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik di dunia. Lebih lanjut dikatakannya pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari. Pemilihan umum yang berfungsi mempertahankan status quo bagi rezim yang ingin terus bercokol dan bila pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini, maka legitimasi dan status quo inilah yang dipertaruhkan, bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukuran-ukurannya itu.

Bagi Indonesia, yang telah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi, pemilu adalah keniscayaan. Dalam pemilu, aspirasi rakyat dimungkinkan berjalan secara ajeg. Pada pemilu pula, rakyat pemilih akan bisa menilai, para kontestan pemilu dapat menawarkan visi, misi, dan program kandidat, sehingga mereka akan tahu ke mana arah perjalanan negaranya.

Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.

Pemilihan umum merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Sampai sekarang pemilihan umum masih dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang penting, karena pemilu melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Demikian juga melalui pemilihan umum, rakyat dapat menyatakan kehendaknya terhadap garis-garis politik.

C. Pengertian dan sejarah Pesta Demokrasi

Dewasa ini, istilah "Pesta Demokrasi" lekat dengan segala jenis pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, mulai dari pemilihan presiden, kepala daerah, hingga anggota legislatif. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan istilah "Pesta Demokrasi" dalam materi promosi Pemilu Serentak 2019. Politisi dari beragam kelompok juga kerap mempertukarkan dua istilah tersebut. Presiden Joko Widodo menyatakan memakai "pesta demokrasi" guna merujuk Pemilu Serentak 2019. "Rakyat menyambut pesta demokrasi itu dengan kegembiraan, dengan antusiasme yang tinggi, serta kedewasaan politik yang semakin matang," ujar Jokowi dalam pidato kenegaraannya, Kamis (16/8/2018). Berbagai media, termasuk Tirto, kerap menggunakan "Pesta Demokrasi" sebagai kata ganti Pemilu. Para media juga menggunakan istilah tersebut dalam materi promosi liputan Pemilu, seperti yang dilakukan Metro TV atau Net TV. Bahkan, BBC Indonesia menggunakan istilah itu dalam nama program khusus berita Pemilu tahun depan. Di Indonesia, bicara pesta demokrasi berarti bicara Pemilu sehingga demokrasi, baik di tingkat individu warga negara maupun lembaga negara, seolah hanya dilaksanakan melalui Pemilu. Lantas, bagaimana bisa Pemilu di Indonesia bisa dipertukarkan dengan istilah "pesta demokrasi"? Baca juga: Beda Sukarno dan Soeharto Dalam Memperlakukan Papua Sejarah Korpri dan Cara Soeharto Mempolitisasi Pegawai Negeri Soeharto dan Pemilu 1982 Pemilu di Indonesia yang pertama kali dijuluki "pesta demokrasi" ialah Pemilu 1982. Yang memberi julukan itu, tidak lain, adalah Soeharto, presiden daripada Indonesia. Soeharto menyematkan julukan itu saat berpidato di Pembukaan Rapat Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia di Jakarta, Senin, 23 Februari 1981. "Pemilu harus dirasakan sebagai pesta poranya demokrasi, sebagai penggunaan hak demokrasi yang bertanggung jawab dan sama sekali tidak berubah menjadi sesuatu yang menegangkan dan mencekam," kata Soeharto. Isi pidato itu juga mencerminkan pandangan Soeharto mengenai Pemilu—pandangan yang kemudian memengaruhi jalannya Pemilu di Indonesia. Menurutnya, Pemilu dilaksanakan untuk memperkokoh persatuan nasional, mendewasakan kehidupan demokrasi, dan menggelorakan semangat pembangunan. Sebaliknya, Pemilu bukan untuk menceraikan persatuan nasional, melemahkan kehidupan demokrasi, dan menghambat persatuan nasional. Pemilu 1982 merupakan Pemilu ketiga di era Orde Baru. Setelah Soeharto menjabat presiden pada 1967, pemerintahannya menyelenggarakan Pemilu pertama kali pada 1971. Di Pemilu 1971, Golongan Karya, kekuatan baru dalam politik di Indonesia, menang telak dengan perolehan suara mencapai 62,8 persen. Golkar juga memenangkan Pemilu berikutnya, Pemilu 1977, dengan perolehan suara sebesar 62,11 persen. Kemenangan Golkar tidak lepas dari intervensi Soeharto yang menguasai kendali pemerintahan saat itu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1969 (Permen 12) melarang anggota Golongan Karya yang menjabat di DPRD menjadi anggota partai politik lainnya. Sedangkan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1970 melarang semua pegawai negeri termasuk anggota ABRI terlibat dalam kegiatan-kegiatan partai politik. Orde Baru juga menyingkirkan tokoh-tokoh radikal di setiap partai. Sementara itu, sebelum Pemilu 1977, jumlah partai politik dipangkas melalui kebijakan fusi partai yang digelar pada 1973.

Partai yang beraliran Islam digabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan yang nasionalis atau non-Islam digabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Studi Gordon R. Hein mengenai Pemilu 1982 yang dipublikasikan dalam makalah "Indonesia in 1981: Countdown to The General Election" (1982) menyebutkan pemerintah mewajibkan pegawai negeri dan keluarganya untuk memilih Golkar di Pemilu. Dengan begitu, Golkar memiliki jaringan komunikasi dan mobilisasi elektoral hingga tingkat daerah. Sementara itu, PPP dan PDI dicegah kampanye di tingkat daerah kecuali di 45 hari masa kampanye. "Alasan pemerintah membatasi kegiatan partai di tingkat daerah ialah agitasi politik terus-menerus di kalangan rakyat tidak kondusif bagi stabilitas dan pembangunan daerah. Penduduk desa Indonesia mesti tetap menjadi massa mengambang yang dihindarkan dari konflik politik partisan kecuali di periode singkat dalam Pemilu yang dibikin 5 tahun sekali," sebut Hein. Di satu sisi, sebelum Soeharto menyampaikan pidato "Pesta Demokrasi", pelbagai kalangan sudah melancarkan kritik kepadanya. Para mahasiswa, atas dukungan sejumlah jenderal Angkatan Darat, melancarkan demonstrasi besar pada 1974. Demonstrasi besar pertama di era Orde Baru itu, kemudian, disebut Malapetaka 15 Januari 1974. Lalu, pada 5 Mei 1980, 50 orang yang tergolong tokoh-tokoh nasional menandatangani petisi yang menggugat Soeharto karena ingin menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal seluruh organisasi, termasuk partai politik, di Indonesia. Seruan yang disebut Petisi 50 itu lalu disampaikan ke DPR pada 13 Mei 1980. Penggerak Malari 1974 ditangkap dan dipenjara. Para jenderal yang ditengarai terlibat dimutasi. Sedangkan para tokoh Petisi 50 dilarang ke luar negeri, dipersulit bisnis dan pekerjaannya, dan tidak boleh datang ke acara yang dihadiri Soeharto. Melalui pidato "Pesta Demokrasi" itu pula, The Smiling General menegaskan kembali pandangannya soal kritik. Kritik tidak dimatikan. Begitu kata Soeharto. Namun, kritik mesti disampaikan secara sopan, tidak melunturkan rasa kekeluargaan yang menjadi adat budaya bangsa, dan tidak menggoyahkan stabilitas politik yang menurutnya "sudah terbina secara baik". "Dan kita percaya, jika kita dapat melaksanakan Pemilihan Umum yang demikian, maka demokrasi kita akan terus tumbuh bertambah subur dan makin kokoh," ujar Soeharto. (?) (<https://tirto.id/pesta-demokrasi-istilah-pemilu-ciptaan-daripada-soeharto-dbqJ>)

D.Sejarah “Serangan Fajar” di Indonesia

Istilah serangan fajar mungkin sudah tidak asing lagi terdengar ditelinga kita, serangan fajar adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang yang mencalonkan diri sebagai seorang pejabat, demi memperoleh sebuah kemenangan. Serangan fajar biasanya terjadi pada malam hari sampai fajar tiba, biasanya para calon pejabat mengintruksikan kepada simpatisan atau tim suksesnya untuk membagikan uang kepada masyarakat baik itu masyarakat menengah ke atas, maupun masyarakat menengah ke bawah hal itu dilakukan secara terstruktur dan masif demi memperoleh kemenangan. Adapun awal mula terjadinya serangan fajar sudah terbilang cukup lama, hal itu terjadi ketika Thomas Stanford Raffles memberlakukan sistem pemilihan kepala desa tidak lagi diwariskan secara turun temurun melainkan dipilih langsung oleh masyarakat Kemudian dalam Staatblad No.490 juga memuat aturan yang disebut IGOB (Inlandsche Gemeente Ordonnantie Biutengewsten, yang mengatur regulasi pemerintahan desa aturan tersebut mengatur tentang aturan baru yang memuat wewenang pemerintah desa serta aturan terkait dengan susun organisasi termasuk tata tertib beserta aturan hukum lainnya.

Latar belakang terjadinya Inlandsche Gemeente Ordonnantie Biutengewsten melainkan pecahnya perang Diponogoro melawan pasukan tentara belanda dan para pasukan diponogoro merekrut sebuah pasukan baru di desa-desa untuk menghalau tentara belanda. Setelah itu

pemerintah belanda memerintahkan Binenland Bestuur atau seorang camat, untuk memberlakukan aturan [kolonial](#) yaitu membahas tentang aturan pemelihan kepala desa dengan menggunakan aturan dari Belanda. Hal yang dilakukan pada saat itu adalah dengan memilih orang kepercayaan dari pemerintah belanda, untuk memilihnya dengan cara memberikan ketidakseimbangan dalam bentuk uang atau barang. Sejak saat itulah muncul yang namanya [politik](#) uang di [Indonesia](#). Kita ketahui bahwasanya politik uang merupakan cara yang kotor yang dilakukan oleh pemerintah belanda, semenjak saat itu politik adu domba mulai digemborkan oleh pemerintah belanda dengan memainkan kekuasaan kolonial dan merekrut seseorang pribumi duduk di pemerintahan dan memaksa masyarakat untuk memilihnya. Jika pada saat ini ada beberapa caleg atau seorang calon pejabat yang masih menggunakan sistem serangan fajar atau politik uang, berarti orang tersebut mengamalkan dan mewariskan budaya negatif dari pemerintah belanda.

(<https://www.kompasiana.com/nimam/5cb5f5d8a8bc1553da458562/sejarah-serangan-fajar-dan-politik-uang-di-indonesia>)

E. Contoh Masalah Terkait istilah “Serangan Fajar”

Oprasi Tangkap Tangan yang di lakukan terhadap Bowo Sidik

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso diduga mempersiapkan 400 ribu amplop yang berisi pecahan uang Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu. KPK menemukan ratusan ribu amplop itu tersimpan di dalam 84 kardus. Uang itu diamankan di salah satu lokasi di kawasan Pejaten saat operasi tangkap tangan (OTT). Nilainya, sekitar Rp 8 miliar. "Kami duga dari bukti yang kami dapatkan itu akan digunakan untuk pendanaan politik, dalam tanda kutip serangan fajar pada pemilu 2019 tanggal 17 April nanti," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019). Baca juga: KPK Tegaskan Rp 8 Miliar dalam OTT Bowo Sidik Tak Terkait Kepentingan Capres Tertentu Uang itu diduga dipersiapkan untuk dibagikan kepada warga atau kerap diistilahkan dengan "serangan fajar" terkait pencalonannya sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2019. KPK menduga ada dua sumber penerimaan uang. Pertama, diduga berkaitan dengan commitment fee untuk membantu pihak PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) menjalin kerja sama penyewaan kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik. Penyewaan itu terkait kepentingan distribusi. Baca juga: Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso Sempat Berusaha Kabur dari Tim KPK Kedua, KPK menduga ada penerimaan dari sumber lain oleh Bowo, terkait jabatannya sebagai anggota DPR. Saat ini, KPK masih menelusuri lebih lanjut sumber penerimaan lain tersebut. "Jadi suapnya spesifik terkait dengan kerja sama pengangkutan untuk distribusi pupuk. Sedangkan Pasal 12B (pasal gratifikasi) adalah dugaan penerimaan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya sebagai penyelenggara negara," kata Febri. (<https://nasional.kompas.com/read/2019/03/29/07275251/ott-kpk-bowo-sidik-pangarso-diduga-persiapkan-400000-amplop-uang-serangan>)

Pembahasan Masalah

Politik adalah Kotor

Pada dasarnya, tujuan dari setiap individu adalah untuk menuju kebaikan. Setiap tindakan apapun yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok pasti bertujuan untuk kebaikan. Begitu pula politik, tujuan politik adalah untuk kebaikan masyarakat. Mereka yang terjun di dunia politik adalah mereka yang menginginkan kebaikan untuk masyarakat dan pemerintahan di bawah mereka. Ada sebagian mereka yang berpolitik secara bersih dan benar, tetapi tidak sedikit juga mereka yang berpolitik dengan cara kotor. Seperti halnya istilah “serangan fajar”, ini adalah salah satu contoh kegiatan politik untuk tujuan yang baik tapi dengan cara yang salah. Para pelaku menggunakan serangan fajar untuk mendapat dukungan dari masyarakat. Ya, memang benar tujuan mereka adalah untuk mendapat suara dari masyarakat sehingga mereka bisa menjadi seperti apa yang mereka inginkan dan dapat mengayomi masyarakat. Tapi, apakah yang dilakukan ini benar, tentunya salah. Mereka menuju kebaikan tapi dengan cara yang salah. Lucu memang, adat ini sudah ada sejak dahulu, tapi entah kenapa masih banyak yang melakukan kegiatan seperti ini. Padahal, mereka yang terjun ke dunia politik pasti mereka yang berpendidikan tinggi. Jika mereka adalah orang-orang yang tulus dan baik, mereka pasti tidak khawatir masyarakat tidak memilih mereka apabila tidak melakukan serangan fajar.

Di lihat dari budaya masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa menerima uang ataupun barang dari para pelaku politik, maka tidak heran setiap pesta demokrasi berlangsung selalu terjadi apa yang disebut dengan istilah serangan fajar. Dari sini kita seharusnya tidak hanya selalu menyalahkan para pelaku serangan fajar. Karena dari masyarakat sendiri, terbiasa menerima uang atau barang sebagai serangan fajar. Karena jika tidak ada pemberian, maka antusiasme masyarakat kurang untuk mengikuti kegiatan pemilihan umum tersebut. Tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Pasal 187A ayat (1), Undang-Undang tentang Pilkada diatur, setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih maka orang tersebut dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, plus denda paling sedikit Rp 200 juta hingga maksimal Rp 1 miliar.

Sebenarnya pemerintah sudah membentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas untuk mengawasi kegiatan kontestasi politik tersebut. Tugas mereka adalah mengawasi dan menindak pelanggaran pemilu. Kebanyakan, tindak pelanggaran yang di proses oleh lembaga tersebut hanya tindak pelanggaran administratif saja. Tetapi pada kenyataannya politik uang masih terjadi di kalangan masyarakat.

Politik itu sebenarnya tidak kotor, hanya manusianya yang kotor karena gila jabatan. Manusia menghalalkan segala cara untuk mendapat jabatan sesuai apa yang di inginkan. Negara tanpa politik adalah hal yang mustahil, karena kebijakan yang di lakukan selalu bersinggungan dengan politik. Dengan adanya oknum yang gila jabatan tersebut, banyak dari masyarakat berfikir negatif terhadap politik. Mereka percaya bahwa politik hanya berisi orang yang gila jabatan dan peraturan yang di buat untuk kepentingan pribadi atau suatu kelompok. Tetapi masyarakat sendiri tidak menyadari bahwa mereka juga ikut dan mendukung perilaku oknum politikus tersebut dengan cara menerima serangan fajar tersebut.

Kesimpulan

Indonesia adalah negara demokrasi. Maka dari itu, Indonesia tak luput dari kegiatan berpolitik. Politik sebenarnya tidak kotor, yang kotor adalah manusia yang menjalankan politik tersebut. Dengan adanya kecurangan tersebut, membuat banyak masyarakat beranggapan bahwa politik itu adalah kotor. Tetapi ada beberapa orang yang benar-benar bersih dan tulus untuk terjun ke dunia politik demi memperjuangkan hak masyarakat.

Di perlukan juga peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam memerangi politik uang yang terjadi saat ini dengan cara menolak pemberian serangan fajar baik berupa uang atau barang lainnya. Dukungan pemerintah juga di harapkan membantu pencegahan politik uang, dengan berkampanye pada slogan, leaflet, baliho atau pada saluran televisi.

Pendidikan sejak dini berkaitan dengan etika dan politik juga menjadi salah satu faktor terwujudnya Indonesia dengan politik yang sehat. Kesadaran akan kejujuran, ketulusan untuk masyarakat, dan kebaikan- kebaikan lainnya sangat berpengaruh terhadap generasi yang akan datang. Maka dari itu Indonesia memerlukan pendidikan etika moral untuk membentuk generasi muda Indonesia yang sadar politik sehat.

Daftar Pustaka

(<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-politik.html>)

<https://tirto.id/pesta-demokrasi-istilah-pemilu-ciptaan-daripada-soeharto-dbqJ>

(<https://www.kompasiana.com/nimam/5cb5f5d8a8bc1553da458562/sejarah-serangan-fajar-dan-politik-uang-di-indonesia>)

(<https://nasional.kompas.com/read/2019/03/29/07275251/ott-kpk-bowo-sidik-pangarso-diduga-persiapkan-400000-amplop-uang-serangan>)

Dewantara, A. (2017). Filsafat Moral (Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia).

Dewantara, A. W. (2017). Kerasulan Awam Di Bidang Politik (Sosial-Kemasyarakatan), Dan Relevansinya Bagi Multikulturalisme Indonesia. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 18(9), 3-15.

Dewantara, A. W. (2017). DIKTAT ETIKA-FILSAFAT MORAL. *Yogyakarta: PT KANISIUS*.